

THE INFLUENCE OF GULF WAR II ON IRAQ'S SOVEREIGNTY "AFTER THE INVASION OF KUWAIT IN 1990-2003"

David El Roy Waruwu^{1*}, Triwahana²

^{1,2}Department of History Education, Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

davidelroy2001@gmail.com^{1*}, triwahana@upy.ac.id²

**Corresponding author*

Manuscript received Maret 22, 2024; revised April 16, 2024; accepted April 18, 2024; Published Juli 30, 2024

ABSTRACT

This research aims to find out 1) The background of Gulf War II, 2) The process of the Second Gulf War, and 3) The impact that occurred after the end of the Second Gulf War. This research uses literature research methods, and uses a descriptive approach that aims to describe the research accurately, factually, and coherently. The mechanism of this research starts from collecting sources (Heuristics), criticizing sources (Verification), interpreting or interpreting based on objectives, and doing historiography or historical writing. The results of the study concluded that, (1) The background of the Second Gulf War was due to Iraq's invasion of Kuwait, (2) The process of the Second Gulf War began when Iraq invaded Kuwait on August 2, 1990, and officially ended on February 28, 1991, (3) The impact of the Second Gulf War affected the sovereignty, economy and politics of Iraq.

Keywords: Economy, Invasion, Iraq, Sovereignty, and Politics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Latar belakang terjadinya Perang Teluk II, 2) Proses terjadinya Perang Teluk II, dan 3) Dampak yang terjadi setelah usainya Perang Teluk II. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur atau kepustakaan, dan menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi penelitian secara akurat, faktual, dan secara runtut. Adapun mekanisme penelitian ini bermula dari mengumpulkan sumber (Heuristik), melakukan kritik sumber (Verifikasi), interpretasi atau menafsirkan berdasarkan objektif, dan melakukan historiografi atau penulisan sejarah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, (1) Hal yang melatar belakangi terjadinya Perang Teluk II dikarenakan invasi Irak atas negara Kuwait, (2) Proses terjadinya Perang Teluk II dimulai saat Irak menginvasi Kuwait pada 2 Agustus 1990, dan secara resmi berakhir pada tanggal 28 Februari 1991, (3) Dampak Perang Teluk II berimbas pada Kedaulatan, Ekonomi dan Politik negara Irak.

Kata kunci: Ekonomi, Invasi, Irak, Kedaulatan dan Politik

INTRODUCTION

Kawasan teluk yang dikenal mempunyai persediaan minyak yang melimpah juga dikenal sebagai wilayah yang sering terlibat konflik kekerasan militer. Hal ini dikarenakan kandungan minyak yang melimpah sehingga minyak juga dapat menjadi senjata politik global (Ghozali, 2019). Suatu negara juga dapat melakukan invasi atau penguasaan terhadap negara lain, tanpa menggunakan militer, namun dapat juga melalui ekonomi dan budaya (Birsyada, 2021).

Perang Teluk II 1990-1991 merupakan akibat dari Perang Teluk I. Setelah Perang Teluk I usai, Irak dan Iran sama-sama menderita kerugian terutama di bidang ekonomi. Perang ini dimulai ketika Irak yang dianggap sebagai pihak *aggressor* perang menginvasi Kuwait (Nugraheni, 2021). Irak saat itu dibawah pemerintahan Saddam Hussein yang sangat kental terhadap politik kerabat. Hal ini serupa dengan sistem Kerajaan yang menunjuk pemimpin tertinggi berdasarkan garis keturunan (Birsyada & Siswanta, 2021).

Usai menginvasi Kuwait, Irak mendapat kecaman dari dunia internasional termasuk AS yang akhirnya memaksa Irak pergi dari tanah Kuwait usai diserang oleh AS beserta koalisi, dengan kode (*Operation Desert Storm*) atau operasi badai gurun. Hal ini mengakibatkan keadaan keamanan, politik, dan ekonomi negara Irak dilanda kekacauan pasca invasinya ke Kuwait. (Winarno, 2014).

Kerumitan Perang Teluk tersebut memiliki berbagai alasan seperti perbedaan ideologi, perbedaan pandangan politik, propaganda religius, persaingan etnis dan kepentingan nasional masing-masing negara (Wicaksono, 2019). Keterlibatan AS dalam Perang Teluk terlihat dengan penyebaran ideologi demokrasinya. Hal serupa juga telah dialami Indonesia melalui Jepang dalam penanaman ideologinya (Birsyada dkk., 2022).

Perang Teluk II ini mengakibatkan pilu terutama bagi masyarakat sipil, sejumlah 112.000 jiwa penduduk yang kehilangan nyawanya, pengangguran yang meningkat, banyaknya Infrastruktur yang hancur, diaspora secara massal, meningkatnya ketidakseimbangan gizi atau malnutrisi terhadap anak-anak dikarenakan perang, dan trauma terhadap perang. Perang Teluk II ini mengakibatkan negara Irak porak- poranda dikarenakan serangan militer Amerika dan koalisi (Arofah, 2021). Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Latar belakang terjadinya Perang Teluk II, 2) Proses terjadinya Perang Teluk II, dan 3) Dampak yang terjadi setelah usainya Perang Teluk II.

METHOD

Penulis menggunakan metode penelitian literatur atau metode penelitian kepustakaan. Secara umum sumber penelitian terdiri dari dua yakni sumber data utama (Primer) dan sumber data kedua Sekunder (Nurgiansah & Rachman, 2022). Dalam metode penelitian literatur, data primer adalah data yang utama contohnya ialah pelaku sejarah. Sedangkan data sekunder berupa data yang mengalami pengolahan data yang dapat berasal dari jurnal, buku, artikel dan majalah (Asmara, 2019).

Penulis menekankan bahwa pengumpulan data-data sekunder yang dihimpun penulis merupakan sumber yang mempunyai relevansinya dengan penelitian yang diangkat penulis yakni seputar Perang Teluk II. Setelah data diperoleh maka data tersebut dianalisis penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang bertujuan menguraikan suatu masalah dan juga berusaha menjelaskan atau memberikan suatu pemahaman (Habsy, 2017).

Mekanisme Metode Penelitian Literatur

1. Mengumpulkan Sumber (Heuristik)

Penulis mengumpulkan sumber-sumber sekunder yakni buku-buku dan

artikel jurnal sebagai bahan penelitian, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber primer atau pelaku sejarah. Secara teknisnya penelitian metode penelitian literatur adalah kajian yang berupa jenis penelitian yang mengumpulkan data, rangkuman dan teori yang relevan sesuai dengan tema yang diteliti penulis. Sumber sekunder dapat berupa sumber yang tertulis seperti buku-buku artikel, jurnal, dan dokumen lain (Prayogi, 2021).

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah penulis melalui tahap pengumpulan data maka penulis akan mengkritisi penelitian yang dihimpun oleh penulis, sehingga dengan mengkritisi penelitian sebelumnya maka penulis dapat melakukan tahapan selanjutnya dalam metode penelitian literatur yakni interpretasi data atau penafsiran sumber oleh penulis.

Penulis menemukan bahwa penelitian yang benar membutuhkan kritik sumber penelitian dengan tujuan menguji kredibilitas atau kebenaran data terhadap sumber yang dijadikan acuan dalam penulisan artikel. Penulis melakukan verifikasi data atau kritik sumber supaya penulisan artikel dapat di pertanggung jawabkan. Adapun kritik sumber itu terdiri atas dua jenis yakni kritik sumber Internal dan kritik sumber Eksternal (Herdiani, 2016).

Kritik eksternal ini berfungsi untuk memeriksa apakah sumber atau referensi tersebut asli atau palsu, dan apakah sumber tersebut merupakan sumber yang benar atau salah. Jadi untuk kritik eksternal berfungsi untuk memverifikasi kebenaran data (Hermawan, 2016). Kritik internal berfungsi untuk menilai dan memeriksa keakuratan atau kebenaran sumber yang dijadikan acuan dan referensi penulisan artikel.

Kritik internal berfungsi untuk menguji kredibilitas, kualitas, kesaksian, dan kepercayaan penulis terhadap data, sehingga pada akhirnya penulis memperoleh data yang valid melalui kritik eksternal dan kritik internal.

Artikel dengan judul penelitian “Refleksi Watak Ekspansionisme Amerika Pada Perang Teluk” karya Rusydi M., Y. (2014), menguraikan secara rinci bagaimana keadaan negara Irak saat Perang Teluk II hingga awal pecahnya Perang Teluk III. Penelitian ini juga berisikan refleksi terhadap sifat ekspansionisme Amerika dalam beberapa konflik di belahan dunia termasuk dalam Perang Teluk II. Hal ini merupakan bukti usahanya dalam mewujudkan konsep John Winthrop. Konsep ini berupa American Dream and city upon the Hill, dengan konsep ini maka Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka merupakan negara superior dan yang terunggul dan juga mengklaim dirinya sebagai polisi dunia. Sehingga berangkat dari cita-cita ini maka AS berusaha melakukan ekspansi untuk memaksakan kehendaknya kepada negara lain dan negara lain harus tunduk di bawah kontrol, pengaruh, dominasi dan otoritas Amerika Serikat. Penelitian ini didukung oleh sumber-sumber yang relevan dengan penelitian penulisnya.

Artikel dengan judul penelitian “Implikasi Hukum Tindakan Invasi Irak Terhadap Kuwait Dalam Perspektif Hukum Internasional” karya Karendrarswara

menjelaskan bagaimana proses sanksi secara hukum internasional terhadap tindakan invasi Irak ke Kuwait. Penelitian ini menjelaskan bagaimana reaksi dunia internasional yang mengecam keras tindakan invasi tersebut, sehingga dunia internasional melalui wadah PBB melakukan embargo ekonomi dan berakhir pada putusan penggunaan militer dalam mengusir Irak keluar dari Kuwait dikarenakan tidak mengindahkan ultimatum PBB. Penelitian jurnal ini didukung oleh sumber-sumber yang relevan dan akurat.

Artikel dengan judul penelitian “Analisis Determinan Amerika Serikat Dalam Penggunaan Private Military Company Pada Perang Irak Tahun 2003” karya Dhiaulhaq menekankan kepada penelitian pasca Perang Teluk II. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana Amerika Serikat berusaha menumbangkan rezim Saddam Hussein melalui berbagai cara, salah satunya penggunaan jasa Private Military Company (PMC) dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber yang relevan.

Penulis telah mengevaluasi serta memverifikasi atau mengkritisi data sekunder yang diperoleh yang berbentuk jurnal-jurnal seputar Perang Teluk II. Penulis belum menemukan kesalahan dari data yang dihimpun, sehingga penulis yakin akan kebenaran data sekunder yang telah diperoleh. Penulis telah melakukan kritik eksternal dan internal serta sumber-sumber jurnal yang dihimpun penulis mempunyai masa waktu maksimal 10 tahun ke bawah.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan bagian dari tahap-tahap penelitian yang bertujuan menyusun fakta sejarah yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain, dan disusun secara kronologis. Interpretasi dalam penulisan artikel diharapkan dapat mendeskripsikan kondisi yang benar adanya (Fitri & Susanto, 2021). Interpretasi penulisan artikel ini diharapkan dapat menggambarkan Pengaruh Perang Teluk II Terhadap Kedaulatan Irak “Pasca Invasi Kuwait Tahun 1990-2003”.

Interpretasi atau penafsiran dalam sumber sejarah kerap kali mengalami kesalahan dikarenakan adanya subjektivitas dalam melakukan penafsiran data. Analisis adalah penguraian, pemeriksaan, dan penyelidikan data untuk mengetahui data dan keadaan yang sebenarnya. (Kuntowijoyo, 2013).

Setelah mengkritisi sumber-sumber di atas maka penulis menemukan bahwa pada akhirnya Perang Teluk II yang terjadi dalam kurun waktu 1990-1991, mempunyai dampak yang besar terhadap politik, ekonomi dan kedaulatan bangsa Irak, bahkan efeknya masih berimbas pada hari ini. Penulis melihat imbas dari perang tersebut dari ekonomi Irak yang belum benar-benar pulih seperti sebelum terjadinya Perang Teluk yang terbagi dalam tiga periodisasi.

Penulis juga menemukan bahwa Irak dan Amerika pada dasarnya ingin menjadi negara yang besar. Walau dalam Perang Teluk ini Irak sangat dirugikan, namun keduanya tidak lebih baik dari yang lain karena mengorbankan negara lain untuk menggapai ambisinya. Irak mengorbankan Kuwait supaya menjadi negara besar, sedangkan Amerika Serikat melakukan ambisinya dengan lebih halus yakni

melalui kesempatan dalam keterlibatannya dalam Perang Teluk II maka negara AS mendapat kesempatan dalam menguatkan legitimasi akan hegemoninya di dunia internasional.

4. Historiografi

Penulis melalui tahapan Pengumpulan Sumber (Heuristik), Kritik Sumber (Verifikasi), Penafsiran Sumber (Interpretasi), dan Penulisan Sejarah (Historiografi). Pengertian historiografi akan penulis paparkan berikut ini.

Historiografi merupakan hasil atau karya penelitian ilmu sejarah yang telah melalui pengujian (verifikasi) dengan tahapan Heuristik, yang berasal dari bahasa Yunani “Heuriskein” yang mempunyai arti yakni menemukan (Sukmana, 2021). Historiografi harus melalui beberapa tahapan yakni Heuristik (Menemukan data data) melalui pengumpulan sumber, Kritik sumber (Internal dan Eksternal), Interpretasi data (Sintesis dan Analisis) sehingga dapat menghasilkan karya atau hasil penelitian sejarah yang disebutkan dengan nama Historiografi.

Historiografi merupakan implementasi ilmu sejarah. Historiografi pada hakikatnya ada dua arti yakni sejarah penulisan sejarah (Historical of historical writing) dan (Historical writing) penulisan sejarah (Irwanto & Alian, 2014). Penulisan historiografi akan penulis paparkan di bagian hasil dan pembahasan.

RESULTS AND DISCUSSION

Latar Belakang Masalah

Perang Teluk I yang berlangsung selama delapan tahun sejak tahun 1980-1988, tidak menghentikan ambisi Saddam Hussein yang berkeinginan menjadi pemimpin dunia Arab, bahkan menginvasi negara tetangganya yakni Kuwait. Dampak Perang Teluk I turut melatarbelakangi akan invasi Irak ke Kuwait, dampak tersebut dapat terlihat dari dua hal yakni kerugian material dan kerugian atas kehilangan nyawa pasca Perang Teluk I.

Kerugian ekonomi yang di derita oleh Irak begitu besar dan hutang luar negeri Irak semakin besar. Irak pun meminta bantuan ekonomi kepada negara-negara Arab, dan berupa meminta penghapusan utang Irak yang telah berjasa membendung revolusi Iran. Hal tersebut ditolak dengan tegas oleh negara-negara Arab. Hal itu membuat Saddam Hussein sangat kecewa dan hal ini menjadi cikal bakal pecahnya Perang Teluk II, Irak-Kuwait (Tantoh, 2019). Diperkirakan korban perang di pihak Iran sebanyak 500.000 hingga 1.000.000 (Mikail, 2013).

Pola pemerintahan Saddam Hussein yang dikenal dengan otoriter membuat pergolakan ditubuh negara Irak sendiri. Suku Kurdi lah yang paling banyak mendapat persekusi dan penyiksaan badani. Pemberontakan suku Kurdi yang melakukan perang gerilya ini dikarenakan hak-hak sebagai bagian dari masyarakat Irak di kebiri. Saddam Hussein Bersama rezimnya partai Ba'ath melakukan genosida terhadap suku Kurdi pada tahun 1988 menggunakan senjata kimia. Genosida ini menelan korban suku Kurdi sebanyak 20.000 jiwa, hal ini menjadi bukti betapa kejamnya dan otoriternya

pemerintahan Irak di bawah Saddam Hussein (Danisworo dkk., 2013).

Pihak Irak beralih invasinya terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 dikarenakan beberapa faktor. Faktor pertama dikarenakan Kuwait merupakan daerah Irak bila dilihat dari sejarahnya. Faktor kedua Irak membutuhkan dana pemulihan ekonomi negaranya pasca perang dengan Iran, sehingga dengan aneksasi wilayah Kuwait maka diharapkan dapat meringankan utang luar negeri Irak. Faktor ketiga dikarenakan adanya ambisi Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein untuk memperluas wilayahnya. Faktor keempat dikarenakan sengketa ladang minyak (Literati Rumaila), yang terletak di perbatasan kedua negara (Afifudin, 2022).

Penulis melihat adanya intervensi AS dalam Perang Teluk, maka secara tersirat AS lihai mengemas kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional yang dimaksud penulis yakni menjaga suplai minyak bagi negaranya dan menjaga negara-negara sekutunya dari ancaman Irak. Pada saat Perang Teluk I Amerika lebih pro dengan Irak namun saat Perang Teluk II Amerika memerangi Irak, hal ini membuktikan AS mempunyai tujuan tersendiri dalam memaknai sebuah konflik bersenjata (Anwar, 2013).

Proses Perang Teluk

Secara kronologis Perang Teluk II ini bermula ketika Irak menginvasi Kuwait pada 2 Agustus 1990. Hal ini mengakibatkan PBB memberikan ultimatum kepada Irak untuk keluar dari tanah Kuwait, tanpa syarat dengan batasan waktu 15 Januari 1991. Namun Irak tidak mengindahkan ultimatum PBB, sehingga PBB akhirnya memberi mandat kepada AS beserta koalisi untuk menggunakan kekuatan militer, dengan tujuan terciptalah perdamaian internasional.

Sesudah Irak menginvasi Kuwait PBB masih mengupayakan jalan diplomasi antar dua negara, dan berusaha menjadi pihak ketiga dalam menengahi konflik Irak-Kuwait. Salah satu upaya PBB tersebut terwujud dalam menerbitkan beberapa resolusi 660 yang meminta Irak segera pergi dari tanah Kuwait. Negara-negara lainnya pun masih berupaya mencari jalan keluar seperti Uni Soviet, Jepang, Mesir dan Arab Saudi meminta Irak menghentikan pendudukannya. Namun Saddam Hussein tidak menggubrisnya dan terus menduduki negara tersebut (Solichien, 2014).

Pada 23 Juli 1990, Saddam Hussein memerintahkan militer Irak mulai bergerak ke perbatasan Irak- Kuwait, untuk menunjukkan keseriusan permintaan Irak akan bantuan keuangan dari pihak Kuwait. Sebab sebelumnya Irak telah mengancam Kuwait tidak segan-segan menggunakan jalan kekerasan melalui kekuatan militer, untuk dapatkan permintaan yang dikehendakinya.

Pada 27 Juli 1990 tepatnya di kota Jenewa (Swiss), diadakanlah pertemuan negara-negara penghasil minyak, yang bernaung dalam organisasi OPEC, berusaha membantu penyelesaian masalah Irak-Kuwait dengan damai. Irak ikut hadir dalam pertemuan ini dan meminta OPEC menaikkan harga minyak sesuai keinginannya. Akhir pertemuan tersebut menyatakan bahwa OPEC menaikkan harga minyak sesuai keinginan Irak yakni sebesar \$21 per barel, yang naik dari harga sebelumnya sebesar \$18 (Solichien, 2014). Pertemuan tersebut tidak kunjung membuat Saddam Hussein puas bahkan Saddam

Hussein menambahkan 20.000 tentara, di perbatasan kedua negara tersebut untuk mengintimidasi Kuwait.

Pertemuan selanjutnya antara delegasi Irak dan Kuwait, direncanakan pada 28 Juli 1990, namun gagal menemukan kesepakatan dikarenakan permintaan Irak terlampaui besar untuk Kuwait penuhi, hal ini juga tidak terlepas dari dukungan AS dan Inggris yang mendukung Kuwait untuk tidak memberikan apa pun kepada Irak. Pada 31 Juli 1990 pertemuan selanjutnya antara kedua delegasi berlangsung di Jeddah (Arab Saudi), namun masih menuai hasil yang nihil, dikarenakan permintaan Irak kembali ditolak oleh Kuwait (Isawati, 2013).

Pertemuan berikutnya pada tanggal 1 Agustus 1990 di Jeddah, menuai ketegangan saat pihak delegasi Irak mengatakan negaranya telah mengalami kehancuran untuk menahan Islam Syah Iran, namun pihak Kuwait tidak memberikan kompensasi yang diinginkan Irak. Pertemuan diplomasi tersebut tidak menghasilkan jalan keluar, dan bahkan delegasi dari Irak dihina oleh Putra Mahkota Kuwait yang bernama Sheikh Saad Al-Abdullah, yang mengatakan ada negara sahabatnya yang dapat memaksa Irak membayar hutang-hutangnya (Solichien, 2014).

Hal tersebut membuat Saddam Hussein geram dan marah sehingga memerintahkan militernya yang berjumlah lebih dari 100.000, menginvasi Kuwait pada keesokan harinya pukul 01:00. Militer Kuwait tidak dapat berbuat banyak dalam menahan laju pasukan Irak, dan Kuwait dapat direbut dalam tempo 24 jam. Hal ini mengakibatkan keluarga kerajaan, dan sebagian besar militer Kuwait dan sekitar 300.000 penduduk mengungsi ke Arab Saudi (Karendrarswara dkk., 2022).

Militer Irak yang telah berpengalaman di Perang Teluk I dengan Iran, membuat mereka dapat dengan mudah menguasai Kuwait. Serangan Irak ini melibatkan 100.000 prajurit Irak, dan dilengkapi dengan kendaraan militer berat yakni 2.000 tank. Hal ini membuat militer Kuwait kewalahan menghadapi serangan tersebut, dan memaksa keluarga kerajaan Kuwait yakni keluarga Emir Kuwait mengungsi ke Arab Saudi.

Saddam Hussein memasukkan Kuwait sebagai provinsi ke-19 dalam wilayah kedaulatannya, serta mengangkat Gubernur Ali Hassan al-Majid yang merupakan keponakannya. Hal ini juga mengungkapkan adanya praktik politik kerabat dalam pemerintahan Irak. (Solichien, 2014).

Pada 29 November 1990 DK PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa), menerbitkan pernyataan tertulis melalui Resolusi 678 yang mengandung maklumat atau ultimatum, bahwa Irak harus meninggalkan tanah Kuwait paling lambat 15 Januari 1991, bila hal tersebut tidak diindahkan maka PBB di bawah mandat AS dan Koalisi akan mengusir Irak dari tanah Kuwait (Solichien, 2014).

Irak yang tak kunjung keluar dari tanah Kuwait, membuat PBB menggunakan kekuatan militer melalui operasi militer pada 17 Januari 1991, dengan kode operasi badai gurun (Operation desert storm), yang membuat tentara Irak terpaksa meninggalkan Kuwait. Setelah Perang Teluk II dinyatakan berakhir, maka PBB di bawah mandat Amerika Serikat dan koalisi mengenakan sanksi bagi Irak yakni embargo ekonomi yang membuat Irak mengalami lumpuh roda perekonomian, dan Irak juga di isolasi secara

politik dunia (Karendrarswara dkk., 2022).

AS awalnya tidak begitu menganggap serius akan pergerakan militer Irak di perbatasan Irak-Kuwait. Namun ketika Kuwait di invasi dan Kuwait serta Arab Saudi meminta pertolongan AS, maka militer AS segera ditempatkan di Arab Saudi dengan jumlah yang fantastis yakni 210.000 pasukan. Serangan pihak AS dan koalisi yang dimulai 17 Januari 1990, berusaha mengincar dan menyerang Irak dari posisi udara, dan berusaha menghancurkan kota Baghdad. Hari kedua Irak meluncurkan 8 Rudal Scud ke Israel, dengan harapan pasukan koalisi berbalik melawan AS bila Israel melakukan serangan balik atas rudal Irak. Namun naas hal tersebut gagal, dikarenakan AS meminta Israel untuk tidak membalas serangan rudal Irak.

Perang antara Irak dan koalisi terus berkobar hingga pasukan koalisi di bawah pimpinan Jenderal Norman Schwarzkopf mengultimatum Irak, untuk segera meninggalkan Kuwait. Bila hal tersebut tidak dipatuhi maka perang darat pun akan pecah. Irak tetap bersikeras untuk menduduki Kuwait sehingga ia menuai akibatnya yakni serangan militer darat dari koalisi.

Serangan udara koalisi menghancurkan titik-tik nadi kehidupan Irak yakni kilang-kilang minyaknya sehingga hal ini memungkinkan pergerakan Irak terhambat. Operasi militer dengan kode Operasi Badai Gurun (Operation Desert Storm), pada akhirnya perang resmi berakhir pada tanggal 28 Februari 1991, setelah George Walker Bush menyatakan perang berakhir (Isawati, 2013).

Dampak Perang Teluk

Penulis berpendapat Perang Teluk ini merupakan perang kelam pasca perang dunia II, hal ini dikarenakan Perang Teluk ini berturut-turut terjadi selama tiga periode. Perang Teluk I antara Irak-Iran, Perang Teluk II Irak-Kuwait dan AS beserta koalisi, dan Perang Teluk III Irak vs AS beserta koalisi. Penderitaan dialami oleh banyak pihak terkhusus negara Irak yang menjadi titik pusat penulisan artikel ini. Kehancuran infrastruktur Irak, ekonomi yang carut marut, kekurangan gizi, dan ketidakstabilan politik mewarnai Irak pasca Perang Teluk II.

Berakhirnya Perang Teluk II ini menyisakan pilu terutama bagi warga sipil Irak, terutama lansia, perempuan dan anak-anak yang mengalami trauma terhadap perang, yang diharapkan segera usai. Korban militer dipihak Koalisi (AS, Perancis, Inggris, Mesir, Arab Saudi) pasca Perang Teluk II diperkirakan sebanyak 213 jiwa meninggal dunia. Pihak Irak diperkirakan kehilangan lebih dari 100.000 tentara, 300.000 mengalami luka-luka, 60.000 lainnya ditawan oleh pihak koalisi (Dhiaulhaq, 2022).

Para petinggi partai Ba'ath yang di bawah komando Saddam Hussein tidak merasakan penderitaan ekonomi masyarakat Irak. Sanksi-sanksi yang lain juga meliputi penyerahan hasil penjualan minyak Irak sebesar 5% ke PBB sebagai ganti rugi agresinya ke Kuwait. Masalah pengangguran dan kemiskinan semakin merebak di tanah Irak. Bahkan kebutuhan dasar Irak saja mengalami kekurangan dikarenakan embargo ekonomi oleh AS beserta sekutu (Imani, 2013).

Ekonomi Irak pun mengalami ketidakstabilan pasalnya Dewan Keamanan PBB

memberlakukan embargo ekonomi, yang mengakibatkan Irak melakukan ekspor secara terbatas untuk mencukupi kebutuhan pokok dalam negeri Irak sendiri. Produk pangan berupa gandum, bahan pangan ternak serta produk pangan lainnya di impor Irak untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya (Arismunandar, 2019).

Perang Teluk II sangat memukul Irak dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan akhir dari perang tersebut sangat tidak menguntungkan Irak sama sekali. Kondisi dalam negeri belum stabil sepenuhnya setelah menginvasi Kuwait, bahkan upaya intervensi asing semakin terlihat dalam pemerintahan Irak, hal ini dibuktikan dengan usaha AS dan Inggris yang berusaha menggulingkan rezim Saddam Hussein dan mengubahnya dengan sistem pemerintah yang lebih demokrasi dan pro kebijakan-kebijakan AS dan sekutunya (Yuliningrum, 2016).

Data dari Departemen Kesehatan Irak melaporkan bahwa selama Perang Teluk II berkobar hingga tahun 2000, Irak menelan kerugian yang teramat besar bahkan 1.300.867 jiwa menjadi korban keji dari perang tersebut. Sebanyak 500.000 ribu di antaranya korban tersebut ialah anak-anak, hal ini dikarenakan embargo ekonomi AS yang berkepanjangan melanda negeri itu sehingga mengakibatkan kesulitan bahan pangan dan obat-obatan. Kedaulatan Irak pun diguncang dengan sangat hebat bahkan penulis dapat mengatakan perang ini merupakan perang paling kelam sejak Perang Dunia II berakhir, pernyataan penulis ini berdasarkan data yang didapat oleh yang mengatakan Irak mengalami masa the lost generation atau kehilangan generasi penerusnya (Winarno, 2014).

Dampak Perang Teluk II pasca Irak invasi Kuwait, berimbas pada pecahnya Perang Teluk III yang mengakibatkan penggulingan kekuasaan rezim Saddam Hussein oleh AS, pada akhirnya membuahkan hasil, yang ditandainya dengan ditangkapnya Saddam Hussein, dan dieksekusi mati dengan cara dengan di gantung. AS menilai Saddam Hussein merupakan penjahat perang, yang telah menyeret negaranya ke dalam Perang Teluk selama tiga periode. Kejatuhan rezim Saddam Hussein membuat kondisi keamanan dalam negeri Irak semakin tidak stabil, sehingga memaksa AS menambah pasukan pendudukan untuk menstabilkan situasi keamanan dalam negeri Irak (Yuliningrum, 2016).

Keadaan politik Irak pasca Perang Teluk II diwarnai dengan dinamika perebutan kekuasaan oleh kaum Sunni, Kaum Syah dan Etnis Kurdi. Sektarian antar ketiga kelompok tersebut sering kali menggunakan penyelesaian konflik dengan mengangkat senjata. (Luthfiatul Udhma, 2018).

Politik Irak mengalami ketidakstabilan politik dalam negeri, dikarenakan goyahnya dan rapuhnya pengaruh rezim Saddam Hussein yang kalah dalam Perang Teluk II. Intervensi militer AS pun sangat dominan dikarenakan AS berusaha menumbangkan rezim Saddam Hussein yang otoriter menjadi pemerintahan yang lebih demokrasi (Baharrudin, 2020).

Jadi dapat disimpulkan oleh penulis keadaan politik Irak pasca Perang Teluk II, mengalami ketidakstabilan politik dikarenakan terjadinya perebutan kekuasaan oleh tiga kelompok yakni Kaum Sunni, Kaum Syah, dan Etnis Kurdi yang telah lama berjuang untuk mendapat hak-hak politiknya, serta intervensi asing yakni AS semakin menguat di

tanah Irak yang berusaha menumbangkan rezim Saddam Hussein dengan berbagai cara.

Penelitian penulis ini dikuatkan oleh beberapa penelitian yang terkait Perang Teluk II seperti berikut ini: Penelitian yang dilakukan oleh (Karendrarswara dkk., 2022) dengan judul penelitian Implikasi Hukum Tindakan Invasi Irak Terhadap Kuwait Dalam Perspektif Hukum Internasional. Penelitian ini berkesimpulan dua hal yakni, waktu Irak invasi Kuwait maka PBB memberikan sanksi militer dan ekonomi bagi Irak karena agresi militernya dan hal kedua penelitian ini menemukan bahwa adanya reaksi keras internasional, hal ini berupa perwujudan dari keinginan bersama dunia internasional dalam menciptakan perdamaian dunia.

Perbedaan atau kebaruan yang sangat menonjol dari penelitian (Karendrarswara dkk., 2022) dengan penelitian penulis yang berjudul Pengaruh Perang Teluk II Terhadap Kedaulatan Irak “Pasca Invasi Kuwait Tahun 1990-2003” dilihat dari sisi mana yang diteliti. Bila penelitian (Karendrarswara dkk., 2022) meneliti dari sisi hukum internasional yang menjelaskan bagaimana reaksi dunia internasional terhadap invasi Irak ke Kuwait. Sedangkan penelitian penulis meninjau bagaimana dampak bagi kedaulatan Irak pasca Irak invasi Kuwait di bidang ekonomi, politik dan kedaulatan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dhiaulhaq, 2022) dengan judul penelitian Analisis Determinan Amerika Serikat dalam penggunaan Private Military Company menyatakan bahwasanya Ketika invasi Irak atas Kuwait maka PBB memberi ultimatum embargo ekonomi atas Irak. Hal ini merupakan cara pertama dalam menyelesaikan konflik di antara kedua negara tersebut.

Pasukan aliansi memberi ultimatum agar Irak meninggalkan Kuwait ditanggal 15 Januari 1991. Namun dikarenakan Irak tidak mengindahkan Ultimatum PBB bahkan semakin gencar menginvasi tanah Kuwait. Maka PBB memberikan hak penggunaan kekuatan kepada pasukan aliansi dalam menghentikan invasi Irak terhadap Kuwait. Pasukan Aliansi terdiri dari negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Mesir, Saudi, Suriah dan beberapa negara lainnya, penggunaan kekuatan militer pun tidak dapat dihindarkan dari kedua belah pihak.

Bila penelitian yang dilakukan oleh (Dhiaulhaq, 2022) lebih mengarah penelitian terhadap dampak penggunaan PMC (Private Military Company) oleh AS dalam mendukung serangannya ke Irak. Maka penelitian penulis lebih berfokus terhadap hal apa saja yang mempengaruhi kedaulatan Irak pasca invasi Kuwait Tahun 1990-2003.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rusydi M., 2014) dengan judul penelitian Refleksi Watak Ekspansionisme Amerika Pada Perang Teluk, menyatakan bahwa motif Amerika Serikat dalam menggempur Irak di Perang Teluk II adalah motif ekonomi. Hal ini dikarenakan Kawasan Timur Tengah menyimpan cadangan minyak terbesar didunia. Berdasarkan data yang diliput dari Center for Global Energy Studies, Irak merupakan penghasil minyak terbesar kedua didunia setelah Arab Saudi.

Kesimpulan dalam penelitian (Rusydi M., 2014) ialah setelah AS menggempur Irak, maka keadaan ekonomi dan politik negara Irak sedang tidak stabil. Maka Amerika Serikat mempunyai kesempatan untuk memperluas pengaruh dan hegemoninya di tanah Irak sehingga tujuan-tujuannya dapat terwujud terutama dalam bidang Politik dan

CONCLUSION

PBB mengisolasi politik Irak di dunia internasional, hal ini membuat Irak menjadi negara yang terisolasi, dan membuat negara ini yang awalnya salah satu negara terkaya karena minyaknya, akhirnya menjadi miskin karena embargo ekonomi, dan politik yang diberlakukan oleh PBB. Pergolakan dan perebutan kekuasaan semakin berkobar, bahkan Irak juga mengalami intervensi asing terutama oleh AS.

REFERENCES

- Affudin, M. D. (2022). Konflik Iran dan Irak, Perang Teluk 1. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah Dan Pengajarannya*, 1(2), 19–28. <https://doi.org/10.572349/DEWARUCI.V1I2.197>
- Anwar, S. (2013). Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein: Kejayaan Sampai Kejatuhannya Dari Tahun 1979-2003. (*Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia*)., 1–13.
- Arismunandar, S. (2019). Sejarah Irak: Dari Sumeria ke Irak Modern. *Academia.Edu*, 1–22.
- Arofah, M. A. R. (2021). Memori, trauma, dan upaya rekonsiliasi perang teluk II dalam novel Sa'atu Bagdad karya Syahad Al-Rawiy. *Jurnal Bahasa Dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada*, IV(2), 139–164. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2020.04201>
- Asmara, D. (2019). Peran Museum dalam Pembelajaran Sejarah. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*, 2(1), 10–20. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i1.707>
- Baharrudin, M. (2020). Signifikansi Energi dalam Dinamika Geopolitik di Timur Tengah. In *Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bakrie* (2020th ed., Vol. 2020, Issue Energi).
- Birsyada, M. I. (2021). Menjawab Tantangan Pandemi: Strategi: Strategi Ekonomi dan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid 19. In M. I. Birsyada (Ed.), *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August). Yayasan Pendidikan Hukum Demokrasi Bangsa (YPHDB).
- Gularso, D., & Fairuzabadi, M. (2022). Strategi Pengembangan Pembelajaran Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia Berbasis Diorama Museum di Sekolah. *Diakronika*, 22(1), 76–95. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol22-iss1/272>
- & Siswanta, S. (2021). Inovasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Pangeran Sambernyowo di Era Masyarakat 5. 0. *Diakronika*, 21(1), 45–56. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol21-iss1/179>
- Danisworo, T. G., Utomo, T. C., & Astuti, P. (2013). Dinamika Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak (Studi Kajian Periode 1979-2012). *Journal of Politic and Government Studies*, 2(3), 196–105.

- Dhiaulhaq, Y. (2022). "Analisis Determinan Amerika Serikat Dalam Penggunaan Private Military Company Pada Perang Irak Tahun 2003". (*Doctoral Dissertation, Faculty of Social and Political Science*). <https://doi.org/10.14710/jirud.v8i2.33469>
- Fitri, M., & Susanto, H. (2021). Nilai Sosial Religi Tradisi Manopeng Pada Masyarakat Banyuw. *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, 7(2), 161–169. <https://doi.org/10.31851/kalpataru.v7i2.7164>
- Ghozali, M. N. A. L. (2019). Studi Empiris tentang Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah di Timur Tengah. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 70–85. DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v4i2.2110>
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Herdiani, E. (2016). Metode Sejarah Dalam Penelitian Tari. *Jurnal Seni Makalangan*, 3(2), 33–45. <http://dx.doi.org/10.26742/mk1ng.v3i2.889>
- Hermawan, S. (2016). Konflik di Suriah Pada Masa Bashar Al-Assad Tahun 2011-2015. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 3(10), 17.
- Imani, P. (2013). Ancaman Keamanan Manusia Dalam Rekonstruksi Amerika Serikat Melalui Intervensi Kemanusiaan Di Irak. *University of Muhammadiyah Malang*, 1–20.
- Irwanto, D., & Alian, S. (2014). Metodologi dan Historiografi Sejarah. In *Lemlit UNSRI*. EJA_PUBLISHER.
- Isawati. (2013). *Sejarah Timur Tengah (Sejarah Asia Barat) Jilid II Dari Revolusi Libya Sampai Revolusi Melati 2011*. Ombak Indonesia.
- Karendrarswara, A. D., Susetyorini, P., & ... (2022). Implikasi Hukum Tindakan Invasi Irak Terhadap Kuwait Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 11 (2). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34604>
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Luthfiatul Udhma. (2018). Kebijakan Pemerintah Irak dalam Mencegah Kemerdekaan Kurdistan Irak Pasca Referendum Tahun 2017. *Digital Repository Universitas Jember*.
- Mikail, K. (2013). Iran di Tengah Hegemoni Barat (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979). *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 13(2).
- Nugraheni, T. R. (2021). Upaya PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Irak Dan Kuwait Pada Perang Teluk 1990-1991. *Jurnal Artefak*, 8(1), 59. <https://doi.org/10.25157/ja.v8i1.4669>
- Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2022). Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 66. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33214>
- Prayogi, A. (2021). Pendekatan Kualitatif dalam Ilmu Sejarah: Sebuah Telaah Konseptual. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 5(2), 240–254. <https://doi.org/10.15575/hm.v5i2.15050>

- Rusydi M., Y. (2014). Refleksi Watak Ekspansionisme Amerika Pada Perang Teluk. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Semester Ganjil 2013/2014: Lembaga Penelitian, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kemitraan Universitas Darma Persada*, 1, 67–76.
- Solichien, Y. (2014). *Saddam Hussein; Kisah di Balik Perang Teluk 1990-1991* (I. Bachtiar (ed.)). PT Elex Media Komputindo.
- Sukmana. (2021). Metode Penelitian Sejarah. Jakarta. *Logos Wacana Ilmu*, April.
- Tantoh, V. (2019). Resensi buku: membaca peradaban dan nasionalisme di Asia Barat. *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 166–173. <https://doi.org/10.33822/mjihi.v1i1.288>
- Wicaksono, S. B. (2019). Kepentingan Nasional Irak dalam Perang Irak-Iran (1980-1988). *Jurnal Hubungan Internasional*, 451, 37.
- Winarno, B. (2014). Satu Dekade Pasca Invasi AS di Irak. *Jurnal Hubungan Internasional*, 3(2), 107–124. <https://doi.org/10.18196/hi.2014.0053.107-124>
- Yuliningrum. (2016). Keputusan Amerika Serikat Melibatkan Halliburton Dan Blackwater Security Consulting Pada Proses Rekontruksi Irak Pasca Invasi Amerika Serikat Ke Irak. *International Relations, Social and Political Science Faculty, Jember University*, 1–94